



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Etika Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru

Legal Ethics Of Civil Servants In The Digitalization Of Legal Services At The Secretariat Of The Banjarbaru City Regional People's Representative Council

Raida Noor Hikmah¹. I Made Dwi Jayantara². Hidayatullah³. Lutfi Yusup Rahmathon⁴

¹²³Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

⁴Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

*Corresponding Author: E-mail: justrerey687@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Nov, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 20 Jan, 2026

Kata Kunci:

Aparatur Sipil Negara; Etika Hukum; Digitalisasi Pelayanan Publik; Sekretariat DPRD; Pelayanan Hukum Digital

Keywords:

Civil Servants; Legal Ethics; Digitalization of Public Services; DPRD Secretariat; Digital Legal Services

DOI: [10.56338/jks.v9i1.7965](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.7965)

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Perkembangan era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru. Transformasi digital tersebut menuntut tidak hanya peningkatan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga penguatan standar etika hukum sebagai landasan profesionalitas ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika hukum ASN dalam prosedur pelayanan hukum berbasis digital di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar etika hukum dalam prosedur digital mampu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas substansi hukum, namun masih dihadapkan pada keterbatasan literasi hukum digital dan ketiadaan kode etik digital khusus. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kode etik digital ASN, pelatihan berkelanjutan literasi hukum digital, serta pengembangan platform interoperable yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika hukum. Dengan demikian, etika hukum berfungsi sebagai fondasi operasional transformasi digital pelayanan hukum di pemerintah daerah.

ABSTRACT

Civil Servants (Aparatur Sipil Negara/ASN), as regulated by Law Number 20 of 2023, are professional public officers consisting of civil servants and government employees with work agreements who serve in governmental institutions. The digital transformation era has significantly reshaped public service governance, including legal services within the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Banjarbaru City. This transformation demands not only efficiency and speed but also the strengthening of legal ethics as a foundation for ASN professionalism. This study aims to analyze the implementation of ASN legal ethics in digital-based legal service procedures and to identify challenges and opportunities in their application. This research employs a normative-empirical legal research method with statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the integration of legal ethics standards into digital procedures enhances effectiveness, accountability, and legal substance quality. However, challenges remain in the form of limited digital legal literacy and the absence of specific digital ethics codes. This study recommends the establishment of a digital code of ethics for ASN, continuous digital legal literacy training, and the development of interoperable platforms embedding legal ethical principles. Thus, legal ethics functions as an operational foundation for digital transformation of legal services in local government.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks negara hukum, penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik memegang peran strategis dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan norma hukum dan etika pemerintahan. Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

ASN tidak hanya dituntut untuk profesional dan kompeten, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dimensi etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum administrasi negara.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan hukum di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Digitalisasi prosedur administrasi legislasi, dokumentasi produk hukum daerah, serta layanan informasi hukum kepada publik bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, transformasi digital juga menimbulkan tantangan baru, seperti perlindungan data, integritas informasi, dan potensi pelanggaran etika oleh aparatur.

Secara konseptual, pelayanan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelayanan administratif biasa karena berkaitan langsung dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan ASN dalam pelayanan hukum berbasis digital harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap etika hukum. Dalam praktiknya, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur etika hukum digital bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD, sehingga menimbulkan potensi kekosongan norma (normative gap).

Penelitian ini memiliki kebaruan pada perumusan konsep etika hukum digital ASN dalam konteks kelembagaan Sekretariat DPRD yang dikaji dari perspektif hukum administrasi negara. Sebagai Langkah nyata Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam menjalankan Etika Hukum sebagai Dasar Penguatan Era Digitalisasi Pelayanan Hukum ASN di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara , Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada e-government dan efisiensi pelayanan publik, artikel ini secara spesifik menganalisis integrasi prinsip etika hukum ke dalam prosedur digital pelayanan hukum lembaga legislatif daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa model normatif etika hukum digital ASN serta kontribusi praktis sebagai dasar perumusan kode etik digital di lingkungan Sekretariat DPRD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), (3) pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan secara

sistematis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Hukum ASN dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.

Etika hukum ASN merupakan bagian integral dari hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pedoman perilaku aparatur dalam menjalankan kewenangan publik. Etika tidak hanya dipahami sebagai norma moral, tetapi juga sebagai seperangkat prinsip yang memiliki implikasi hukum ketika dilanggar. Dalam konteks ASN, etika hukum berkaitan erat dengan asas legalitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum.

Dalam penerapan aturan etika hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) berakar kuat pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas dan supremasi hukum. Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku yang mengikat secara hukum, memastikan administrasi publik berjalan efektif dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN merupakan profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika ASN tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi hukum administrasi, baik berupa sanksi disiplin maupun sanksi etik. Oleh karena itu, etika hukum berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Digitalisasi Pelayanan Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD

Digitalisasi pelayanan hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi legislasi, dokumentasi produk hukum daerah, serta layanan informasi hukum kepada publik telah mengubah pola kerja ASN secara signifikan.

Pelaksanaan Digitalisasi Layanan Hukum pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru khususnya terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) karena di zaman sekarang ini harus melekat dengan teknologi dan informasi dan tentunya semua berkas-berkas dari aturan-aturan tersebut tidak memakan tempat, mudah diakses dimana saja dan praktis bisa disimpan dalam flasdisk.

Adapun Inovasi yang sudah dilaksanakan secara digitalisasi Pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2025, yaitu:

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Setwan.
- Penerimaan Tamu
- KIR Aset
- Veribas (Verifikasi Berkas SPJ)

Dengan mengadopsi teknologi ini, Sekretariat DPRD Banjarbaru tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan. Inovasi ini menjadi contoh nyata bagaimana digitalisasi layanan hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan data, integritas informasi, serta potensi penyalahgunaan sistem digital. Dalam konteks ini, ketiadaan pengaturan khusus mengenai etika hukum digital ASN berpotensi menimbulkan kekosongan norma (normative gap), sehingga perilaku aparatur hanya bergantung pada aturan umum yang belum tentu mampu menjawab kompleksitas persoalan digital.

Urgensi Etika Hukum Digital Bagi ASN Sekretariat DPRD

Etika dan moral meliputi aspek – aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi agar benar-benar bekerja secara professional dibidangnya.

Etika hukum digital bagi ASN Sekretariat DPRD menjadi penting karena pelayanan hukum yang diberikan berkaitan langsung dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sebagai bagian dari representasi rakyat. Setiap tindakan ASN dalam mengelola informasi hukum, menyusun naskah peraturan daerah, maupun memberikan layanan berbasis digital harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan hukum.

Penerapan etika dan hukum digital berfungsi sebagai pedoman moral dan batasan hukum untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, produktif, dan berkeadilan. etika dan hukum digital berfungsi sebagai "kompas moral" dan "pagar hukum" yang membimbing ASN Sekretariat DPRD menjadi profesional dalam menjalankan tugas kedinasan

Ketiadaan kode etik digital yang spesifik dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etik dan hukum, seperti kebocoran dokumen legislasi, manipulasi data, atau konflik kepentingan dalam proses digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma etika hukum yang terintegrasi dengan sistem digital sebagai bagian dari upaya preventif dan korektif.

Implikasi Hukum dan Kelembagaan

Dari perspektif hukum administrasi negara, penguatan etika hukum digital ASN memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD. Pembentukan kode etik digital, pelatihan berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan internal merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa digitalisasi pelayanan hukum berjalan sejalan dengan prinsip good governance.

Lebih rinci mengenai Implikasi hukum adalah dampak atau akibat yang berkaitan dengan aspek legal dari suatu kebijakan, keputusan, atau kejadian. Hal ini mencakup:

Perubahan Peraturan: Adanya kebijakan baru dapat berimplikasi pada kebutuhan untuk mengubah, menambah, atau mencabut undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah yang sudah ada untuk menjaga konsistensi dan hierarki hukum.

Kewenangan: Implikasi ini menentukan sejauh mana wewenang suatu badan atau pejabat dalam mengambil keputusan, yang mana wewenang tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Penegakan Hukum: Suatu implikasi hukum juga mencakup bagaimana aturan baru tersebut akan ditegakkan, termasuk sanksi bagi pelanggar, dan dampaknya terhadap proses peradilan.

Kepastian Hukum: Kebijakan yang baik harus memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum yang terlibat, baik itu masyarakat, pelaku usaha, atau pemerintah itu sendiri.

Implikasi kelembagaan lainnya adalah perlunya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan praktik digital yang berkembang. Dengan demikian, etika hukum digital tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen operasional dalam penyelenggaraan pelayanan hukum berbasis digital.

Lebih rinci mengenai Implikasi kelembagaan berkaitan dengan dampak terhadap organisasi, struktur, fungsi, dan tata kelola lembaga-lembaga yang terlibat dalam penerapan suatu kebijakan. Hal ini mencakup:

Perubahan Struktur Organisasi: Kebijakan baru mungkin memerlukan pembentukan lembaga baru, penggabungan, pembubaran, atau penyesuaian fungsi dari lembaga yang sudah ada agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Koordinasi Antar Lembaga: Implikasi ini menyoroti perlunya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antar lembaga untuk mencegah tumpang tindih kewenangan atau inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas.

Sumber Daya Manusia dan Etika: Implikasi kelembagaan juga dapat mencakup kebutuhan akan reformasi dalam pendidikan dan pelatihan aparat, penanaman etika profesi, serta transparansi dalam proses rekrutmen di dalam lembaga-lembaga tersebut.

Tata Kelola (Governance): Dampak terhadap sistem badan sosial atau organisasi yang menjalankan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk aturan formal dan informal yang mengikat hubungan antar manusia atau antar organisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika hukum ASN merupakan instrumen penting dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan hukum berbasis digital yang akuntabel dan berkeadilan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Digitalisasi pelayanan hukum memberikan peluang peningkatan efisiensi dan transparansi, namun sekaligus menghadirkan risiko pelanggaran etika dan hukum apabila tidak diimbangi dengan pengaturan normatif yang memadai.

Dari perspektif hukum administrasi negara, ketiadaan pengaturan khusus mengenai etika hukum digital ASN berpotensi menimbulkan kekosongan norma yang dapat melemahkan prinsip good governance. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perumusan kode etik hukum digital ASN, penguatan literasi hukum digital melalui pelatihan berkelanjutan, serta pembentukan mekanisme pengawasan internal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan hukum berbasis digital.

SARAN

Pembentukan Kode Etika tau SOP Digital untuk mengatur perilaku dan standar etika dalam penggunaan teknologi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru,

Peningkatan Kesadaran Etika Hukum: ASN perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika hukum dalam digitalisasi pelayanan hukum, serta konsekuensi dari pelanggaran etika hukum,

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 90 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Buku

- Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Dwiyanto, A. (2020). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Marbun,
- S. F. (2018). Hukum administrasi negara I. FH UII Press.
- Winarno, B. (2021). Etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
- Ridwan, J. (2019). Hukum administrasi negara. Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke-2, 2009, hlm.107-108.

Jurnal

- Jurnal Hukum Administrasi Negara, 8(2), 123–138.
- Yusriadi. (2022). Good governance dan tantangan digitalisasi pelayanan publik. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 45–60.
- Niru Anita Siaga, (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Volume 10 No. 2.
- Tardjono, H. (2021). Urgensi etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum, 3(2). Diambil dari Heriyonotardjono@gmail.com
- Rezkie Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7). Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640>
- Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>
- Lutfi Yusup Rahmatoni Dkk. Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/16117>. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117>
- Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024. DKK Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar, Jurnal Pengabdian Al-Iklas <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/16829>
- Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(7). Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/791>
- Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821>
- Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., DKK. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 897–912. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397>
- Rahmathoni, L. Y., & Herlina, S. (2025). Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1791>
- Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1801>
- Herlina, S., Rahmathoni, L. Y., Sudiyono, S., & Gayeta, M. G. (2025). Application of the Principle of Reverse Burden of Proof in the Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1805>

- Muhammad Asy-Syifa Anshari, DKK. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7901>. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901>
- Lutfi Yusup Rahmathoni., Sudiyono., Ahmad Rizqi. (2025). Dinamika Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perlindungan Hukum Dan Ancaman Kebebasan Berekspresi. Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (1): 85-93. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/36>.
- LY Rahmathoni, S Herlina, S Sudiyono - Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278>
- S Herlina, LY Rahmathoni,- Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Smk Negeri 1 Martapura. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i3.20896>
- Munawar, A. ., Rahmathoni, L. Y. ., Sudiyono, S., Zalila, Z., Saputri, H. ., Irpani, A. ., Durgawatie, E. ., & Hariadi, E. . (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 897–912. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397>